

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan optimal. Indikator individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik adalah mampu menyeimbangkan kebutuhan material, spiritual, dan sosial, sehingga mampu hidup layak dan mampu melampaui permasalahan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Banyak kondisi yang tidak sesuai terjadi dalam kehidupan masyarakat fenomena tersebut disebut dengan masalah sosial. Berdasarkan pendapat Soetomo (2010), masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, adat istiadat, dan norma sosial yang dianut. Selain itu, suatu kondisi juga dapat dipandang sebagai suatu masalah sosial karena menimbulkan berbagai menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun non fisik.

Masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia sangat beragam, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran, kriminalitas, masalah lingkungan hidup dan lain sebagainya. Akar dari permasalahan sosial yang memengaruhi munculnya permasalahan yang lain yaitu kemiskinan. Menurut SMERU dalam Suharto et.al, 2004 (dalam Suharto, 2017:134) Kemiskinan didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan

sebagai kondisi yang ditandai oleh masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang banyak disoroti oleh pemerintah maupun negara. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang salah satunya menyebutkan bahwa kemiskinan adalah masalah sosial.

Menurut Badan Pusat Statistika Tahun 2020, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Untuk Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kemiskinan ekstrem adalah Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) diukur menggunakan "*absolute poverty measure*". Permasalahan kemiskinan saat ini, telah terjadi penurunan angka dalam beberapa dekade terakhir, namun tantangan tetap

ada dan perlu diatasi. Angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan.

Mengacu pada 14 kriteria penduduk miskin yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik yaitu; luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per individu, dengan jenis lantai yang terbuat dari bahan seperti tanah, bambu, atau kayu yang ekonomis, dan jenis dinding yang umumnya terbuat dari bahan seperti bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tanpa plesteran tembok. Konsumsi daging, susu, atau ayam umumnya hanya dilakukan sekali dalam seminggu, dan pembelian pakaian baru dibatasi hanya satu setahun. Kebutuhan makanan sehari-hari terbatas hanya satu atau dua kali sehari, dan biaya pengobatan di fasilitas kesehatan umumnya tidak terjangkau 600.000,- per bulan. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga sering kali tidak lebih dari sekolah dasar, dan mereka tidak memiliki tabungan atau aset berharga seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya senilai minimal Rp. 500.000,-. Bila masyarakat mengalami 9 kriteria di atas maka individu tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang dibanding dengan Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen

terhadap Maret 2022. Angka penduduk miskin yang dijelaskan Badan Pusat Statistik tahun 2024 mengalami penurunan.

Ditinjau dari angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, penduduk miskin terkhusus di provinsi Jawa Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024 yaitu pada bulan September 2022 berjumlah 4071,0 kemudian mengalami penurunan pada bulan Maret 2023 menjadi 3.888,60. Dan berdasarkan data tahun 2024 menurun menjadi 3848,7. Salah satu daerah yang mengalami penurunan kemiskinan yaitu Sumedang pada tahun 2021 berjumlah 126.3 jiwa lalu tahun 2022 berjumlah 120.1 jiwa kemudian tahun 2023 berjumlah 111.4 jiwa dan tahun 2024 berjumlah 110,2. Terjadi penurunan angka kemiskinan dari 2021-2024. Pemerintah Kabupaten Sumedang menjelaskan bahwa lonjakan angka kemiskinan terjadi akibat dari Covid-19 yang mengakibatkan banyak individu kehilangan pekerjaan dan kurangnya keterampilan membuat individu terlalu bergantung kepada bantuan pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan angka kemiskinan karena meningkatnya produktivitas masyarakat.

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Kabupaten Sumedang tentang kesejahteraan sosial, menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, dan rencana induk kesejahteraan sosial daerah kabupaten. Penanggulangan yang dimaksud akan dilakukan dengan pengembangan kapasitas, memperkuat peran warga masyarakat, dan meningkatkan kondisi ekonomi serta taraf kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yaitu pemberdayaan

sosial dengan meningkatkan kemauan dan kemampuan, penggalian dan pemanfaatan potensi dan sumber daya, penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha.

Berdasarkan hasil praktikum komunitas Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang dilakukan penulis dari tanggal 31 Oktober sampai 7 Desember 2023, menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang menurun melalui empat strategi yaitu, (1) menurunkan beban pengeluaran diantaranya melalui program-program perlindungan sosial seperti JKN APBD, rantang simpati, PKH, sembako, rutilahu, dan air bersih, (2) meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan UMKM seperti pemberian sarpras UMKM, kelompok usaha bersama, usaha peningkatan pendapatan akseptor (UPPKA), bantuan ternak dan ikan, serta pelatihan kewirausahaan, (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar dan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan sekolah, puskesmas, dan jalan, (4) membangun karakter/mengubah pemikiran melalui *character building* seperti sekoper cinta, dan peningkatan kapasitas para pendamping program.

Desa Pangadegan merupakan desa yang masih memiliki angka kemiskinan. Berdasarkan data terakhir tahun 2023 yang tercatat oleh Kantor Desa Pangadegan terdapat 239 kartu keluarga yang terkategori penduduk miskin. Keluarga yang mengalami kemiskinan terklasifikasi keluarga yang masih memiliki tanggungan anak sekolah dan tanggungan keluarga yang lebih dari 2 orang dengan mata pencaharian yang tidak tetap dan pemasukan yang tidak menentu. Kemiskinan di

Desa Pangadegan disebabkan karena kurangnya inovasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat dilihat dari angka pengeluaran lebih besar dari pemasukan, serta pola pikir masyarakat yang kurang mandiri dan bergantung pada bantuan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah mengupayakan strategi pemberdayaan untuk menangani permasalahan kemiskinan. Desa Pangadegan melakukan upaya pemberdayaan dengan memperhatikan sisi potensi desa yang memiliki wilayah tanah subur untuk pertanian. Jenis pertanian yang ada di wilayah tersebut yaitu, pertanian sayuran, pertanian kopi, dan pertanian padi. Selain pertanian, Desa Pangadegan memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang beragam khususnya dibidang makanan serta usaha konfeksi. Potensi pemberdayaan Desa Pangadegan memiliki peluang yang besar untuk berkembang dibidang pertanian salah satunya kelompok tani kopi.

Berdasarkan teori pemberdayaan Zimmerman, 2000 (dalam Brown, Mary Ellen, and Katie Stalker, 2022 : 8) menjelaskan terkait orientasi nilai dalam bekerja di masyarakat dan model teoritis untuk memahami proses dan konsekuensi dari upaya melakukan kontrol dan pengaruh terhadap sebuah keputusan yang mempengaruhi kehidupan, fungsi, dan kualitas hidup di masyarakat. Sehingga pemberdayaan penting dilakukan sebagai upaya individu untuk bisa membentuk sebuah keputusan yang mempengaruhi kehidupannya sendiri. Karena pada dasarnya pemberdayaan itu bukan diberikan melainkan dibentuk untuk bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di dalam dirinya.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui tahapan yang dijelaskan oleh Mullender dan Ward, 1991 (dalam Adams, Robert 2003 : 96-97) bahwa ada 5 tahapan pemberdayaan yaitu, tahapan (1) tahapan pembentukan tim merupakan langkah sebagaimana kelompok pemberdayaan dapat terbentuk serta dukungan dari sekitar, (2) tahapan pengembangan merupakan langkah dalam pembuatan perencanaan terkait pemecahan masalah, (3) tahapan pemecahan masalah merupakan langkah mengetahui penyebab masalah dan mendapat solusi permasalahan, (4) tahapan pelaksanaan tindakan merupakan langkah melaksanakan solusi permasalahan dengan kesepakatan yang disetujui, (5) tahapan kelompok mengambil alih merupakan langkah menghubungkan permasalahan yang masih ada dan memungkinkan terjadi dari faktor yang lain. Berdasarkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun desa, manfaat yang diperoleh pun beragam. Hal ini selaras dengan pendapat Edi Suharto (2017) yaitu, meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaan individu, memiliki kesejahteraan yang setara, dan memiliki keterampilan yang melekat dan bermanfaat untuk perekonomian. Manfaat dari pemberdayaan yang dirasakan petani di Desa Pangdegan direalisasikan melalui Kelompok Tani Kopi Ciojar.

Berdasarkan hasil penjajagan awal penelitian, Desa Pangadegan memiliki wilayah perkebunan sebesar 77,73 persen merupakan lahan pertanian. Ditinjau dari topografis, wilayah Desa Pangadegan berupa kawasan perbukitan di ketinggian, dengan bagian barat didominasi oleh perbukitan dan semakin ke arah timur semakin menurun. Sektor pertanian didominasi oleh perkebunan dan

persawahan. Desa Pangadegan memiliki potensi kelompok tani kopi yang bernama Ciojar, kelompok ini sudah berdiri sejak 2020.

Berdasarkan hasil praktikum komunitas Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang dilakukan penulis dari tanggal 31 Oktober sampai 7 Desember 2023, Kelompok Tani Kopi Ciojar berdiri melalui pemekaran dari Kelompok Tani Kopi Paniis. Pada mulanya memiliki anggota 25 orang kini memiliki anggota 30 orang. Tujuan dari Kelompok Tani Kopi Ciojar guna menjaga komunikasi petani kopi dalam pengelolaan hasil panen dan membantu meningkatkan penghasilan masyarakat. Kelompok Tani Kopi Ciojar berpotensi untuk mengembangkan hasil tani dengan pengolahan kopi yang lebih modern. Hasil dari petani kopi tersebut dapat memiliki tambahan pendapatan. Pengurus Kelompok Tani Kopi Ciojar menjelaskan bahwa mengelompokkan petani berdasarkan kriteria penghasilan petani yang kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan petani mendapatkan pemasukan kurang lebih lima ratus ribu rupiah perbulan dengan memiliki banyak tanggungan hidup. Upaya pemenuhan yang dilakukan petani dalam memenuhi kebutuhan melalui pekerjaan sampingan sebagai buruh atau kuli bangunan dan meminjam kepada kerabat terdekat.

Pengelompokan tersebut digunakan untuk melakukan pemberdayaan kepada petani dengan peningkatan kapasitas terkait pemahaman pemetikan biji kopi, pengolahan, serta pemasaran dengan harapan hasil tersebut dapat menambah pemasukan petani. Selain itu, pengurus Kelompok Tani Kopi Ciojar memberikan dukungan dan dorongan untuk petani bisa melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Kegiatan pemberdayaan telah diberikan oleh pengurus Kelompok Tani Kopi Ciojar



berlangsung selama 2 tahun terakhir, dengan memantau perkembangan anggota yang difokuskan dalam pemberdayaan. Namun, pada kenyataannya terdapat sebagian kecil petani sebagai sasaran pemberdayaan kurang memiliki penghasilan yang cukup dan tidak adanya dorongan inisiatif dalam mengembangkan usaha dengan pengalaman yang dimiliki.

Mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya pemberdayaan terkait petani. Mengingat bahwa pemberdayaan ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mendorong inisiatif dalam mengembangkan usaha agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih layak. Rencana peninjauan terkait pemberdayaan didasari oleh penelitian-penelitian yang relevan, seperti Dimas Raditya Putra Kurniawan (2022) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara kelompok tani miskin dengan peran pemberdayaan di masyarakat. Melihat fakta di lapangan pada praktikum komunitas tahun 2023, Kelompok Tani Kopi Ciojar memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada petani. Namun, dalam pengembangan usaha para petani masih kurang pengetahuan dan kemampuan seperti, bentuk penyebaran informasi dan penjualan melalui media *online*.

Hal ini selaras dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani yang kurangnya pemasukan dan inovasi dalam pengembangan usaha. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Petani melalui Kelompok Tani Kopi Ciojar di Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada penelitian terkait kelompok tani kopi dan pemberdayaan. Dalam

penelitian ini nantinya memunculkan solusi berupa program yang didalamnya terdapat peran pekerja sosial yang sesuai dengan lingkup pendidikan peneliti.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana “Pemberdayaan Petani melalui Kelompok Tani Kopi Ciojar di Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang”. Berikut fokus permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik informan petani anggota Kelompok Tani Kopi Ciojar?
2. Bagaimana tahapan pemberdayaan yang dilakukan kelompok tani kopi kepada petani ? (Tahap pembentukan tim, tahap pengembangan, tahap pemecahan masalah, tahap pelaksanaan tindakan, dan tahap kelompok mengambil alih)
3. Bagaimana hasil pemberdayaan anggota Kelompok Tani Kopi Ciojar ?
4. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan anggota Kelompok Tani Kopi Ciojar ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Utama**

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan yaitu memperoleh gambaran secara mendalam tentang Pemberdayaan Petani melalui Kelompok Tani Kopi Ciojar di Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan khusus yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai :

1. Karakteristik petani anggota Kelompok Tani Kopi Ciojar.
2. Tahapan pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Tani Kopi Ciojar dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi petani kopi.
3. Hasil pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Tani Kopi Ciojar terhadap petani kopi.
4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Kopi Ciojar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam profesi pekerjaan sosial.
2. Menambah kajian mengenai pemberdayaan anggota kelompok tani kopi melalui isu kemiskinan petani.
3. Menjadi landasan dalam pengembangan model praktik pemberdayaan anggota kelompok tani kopi.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah kemiskinan khususnya pada petani.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat mengenai evaluasi tahapan pemberdayaan yang diberikan Kelompok Tani Kopi Ciojar kepada anggota

kelompok tani yang mengalami permasalahan ekonomi di Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

3. Memberikan masukan kepada pihak pengurus Kelompok Tani Kopi Ciojar untuk melaksanakan tahapan pemberdayaan dan pemantauan kepada anggota kelompok yang mengalami permasalahan ekonomi agar dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.
4. Memberikan masukan kepada pihak Desa Pangadegan untuk mendukung proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Kopi Ciojar guna menyejahterakan masyarakat Desa Pangadegan dengan pengembangan keahlian yang dimiliki oleh kelompok yang ada.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi disusun sesuai dengan pedoman penulisan sebagai berikut :

- BAB I                   PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II                   KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.
- BAB III                 METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar belakang, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, dan jadwal dan langkah –langkah penelitian.
- BAB IV                 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat

tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V**                    **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakuka, langkah – langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisa kelayakan, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI**                    **SIMPULAN DAN SASARAN**, memuat tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**